

## **ANALISIS KEBIJAKAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN BANGKA BELITUNG DARAT KECAMATAN PONTIANAK TENGGARA**

Oleh :

**HANISA<sup>1\*</sup>**

NIM: E1012141100

Sri Haryaningsih <sup>2\*</sup>Elyta<sup>2\*</sup>

\*Email : [e1012141100@student.untan.ac.id](mailto:e1012141100@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura

### **ABSTRAK**

Penulisan ini dimaksudkan untuk menganalisis mengenai pelaksanaan program kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah yang dilaksanakan di daerah kelurahan Bangka Belitung Darat kecamatan Pontianak Tenggara. Pelaksanaan pengelolaan sampah ditujukan agar sampah dapat dikelola dengan baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil teori dari Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) Mengenai proses Analisis Kebijakan Publik, dimana dalam proses-proses yang mendukung Analisis Kebijakan tersebut terdapat lima proses yaitu :1. Formulasi Masalah Kebijakan ,kesimpulannya pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. 2.Perumusan Tujuan dan Sasaran, kesimpulannya dalam pengelolaan sampah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama terutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 3.Mengidentifikasi Parameter Kebijakan,kesimpulannya dari Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak namun fasilitasnya kurang,dan Kelayakan Administratif, dalam penelitian ini baik dan mendukung. 4.Mencari Alternatif-Alternatif, kesimpulannya ada beberapa alternatif kebijakan yaitu Alternatif peningkatan kualitas sarana dan prasarana, dan Alternatif kebijakan pemberian sanksi terhadap pelanggar yang belum diterapkan.5. Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan, kesimpulannya melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif maka dengan menambah anggaran dapat mempermudah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah yang terjadi masih belum maksimal dikarenakan anggaran masih kurang, sehingga menghambat jalannya suatu kebijakan.

**Kata Kunci:** Analisis kebijakan, Pengelolaan, Peraturan, Sanksi.

**ANALYSIS OF POLICY ON WASTE MANAGEMENT IN BANGKA  
BELITUNG DARAT URBAN VILLAGE, SOUTHEAST PONTIANAKSUB-  
DISTRICT**

by

**HANISA 1\***

NIM: E1012141100

Sri Haryaningsih\* Elyta\*

\*Email : [e1012141100@student.untan.ac.id](mailto:e1012141100@student.untan.ac.id)

1. *Student of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak,*
2. *Lecturer of Public Administration Study Program at the Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University, Pontianak.*

**ABSTRACT**

*The research aims to analyze the implementation of government program policies on waste management carried out in the Bangka Belitung Darat Urban Village, Southeast Pontianak Sub-District. Implementation of waste management is intended for waste to be managed properly to create a clean and healthy living environment. The method used in this research was descriptive research with a qualitative approach. This research used the theory proposed by Bridgman and Davis (in Badjuri and Yuwono 2002:65) regarding the Process of Public Policy Analysis, where in the process that support the Policy Analysis there are five stages, namely: 1. Formulation of Policy on Problems, the conclusion is that regarding waste management in Bangka Belitung Darat Urban Village, there is still a lack of public awareness of waste management and inadequate facilities and infrastructure. 2. Formulation of Goals and Targets, the conclusion is that waste management is expected to increase public awareness of environmental cleanliness. 3. Identification of Policy Parameters, the conclusion regarding the Technical Feasibility, it is still categorized as feasible but lacks facilities, and the Administrative Feasibility, in this research, is good and supportive. 4. Looking for Alternatives, the conclusion is that there are several alternative policies, namely Alternatives to improve the quality of facilities and infrastructure, and Alternatives to give sanctions for violators that have not been implemented. 5. Deciding on Alternative Options, the conclusion is that seeing the condition of the implementation of waste management that has not been effective, increasing the budget can make it easier to improve the quality of waste management facilities and infrastructure. The results of this study showed that the waste management is still not optimal because the budget is still insufficient, so it hinders the implementation of a policy.*

**Keywords:** *Policy Analysis, Management, Regulation, Sanction.*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Dengan seiringnya penambahan penduduk dan perkembangan sektor perekonomian yang semakin pesat pada sebuah kota maupun desa dapat memicu timbulnya arus urbanisasi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan pada sektor perumahan dan permukiman. Penyediaan sarana dan prasarana sebagai faktor pendukung sebuah wilayah untuk mengimbangi majunya arah perkembangan penduduk. Penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang tidak dapat mengimbangi akan berdampak terhadap munculnya kekumuhan pada wilayah tersebut.

Munculnya permukiman kumuh disuatu wilayah perkotaan maupun desa merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi terutama di sejumlah kota besar di Indonesia. Minimnya penyediaan sarana dan prasarana daerah permukiman kumuh umumnya dilatar belakangi oleh permasalahan legalitas permukiman tersebut, sehingga berdampak kepada lingkungan. Sebagai contoh, dengan tidak tersedianya sarana prasarana persampahan maka masyarakat akan cenderung mencemari

lingkungan. Sampah menjadi suatu problema yang sering dialami dalam suatu daerah perkotaan maupun pedesaan ketika sampah tidak teroganisir dengan baik.

Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit. Pengelolaan sampah di kota-kota di Indonesia sampai saat ini belum mencapai hasil yang optimal. Sampai saat ini persampahan telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di Indonesia. Faktor keberhasilan pelaksanaan pengelolaan sampah sepenuhnya tergantung pada kemauan pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat tentang artinya lingkungan bersih. Kemauan ini dapat dimulai dari pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sektor pengelolaan sampah sebagai salah satu pencerminan keberhasilan lingkungan.

Selama melakukan penelitian, penulis melihat terdapat masalah di lapangan mengenai lingkungan masyarakat Parit Haji Husein II, dimana penanganan sampah masih sangat kurang optimal karena dapat dilihat dari; 1) tempat pembuangan sampah yang tidak seimbang, 2) waktu pembuangan sampah belum dilakukan secara optimal, 3) pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya seperti tanah kosong, bahkan bantaran sungai. Maka dari itu Dinas Kebersihan Kota Pontianak harus memfasilitasi sarana dan prasarana untuk kebutuhan lingkungan, dan memperhatikan apakah petugas kebersihan sudah berperan aktif dalam penanganan sampah yang mana perharinya masyarakat yang membuang sampah sangat banyak bahkan hingga membuat sampah banyak bertumpuk di tempat pembuangan sampah.

Peneliti juga melihat dari sisi kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan yang masih sangat minim karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya sehingga sampah-sampah banyak berserakan bahkan dipinggiran jalan. Untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat pemerintah harus lebih tegas dan giat lagi dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang arti pentingnya lingkungan sehat dan bersih demi keberlangsungan hidup.

Dalam upaya pembangunan tersebut, penyediaan fasilitas dan ekonomi serta perasarana dan sarana lingkungan perlu ditingkatkan lagi secara merata sekaligus penyempurnaan metode penanganan sampah, dengan mendorong dimana pengembangan kemampuan secara merata terhadap peran masyarakat, serta mendorong perilaku hidup sehat dan tertib, yang telah disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Dalam penanganan sampah pemukiman memerlukan partisipasi aktif individu dan kelompok masyarakat selain peran pemerintah sebagai fasilitator. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan lingkungan masih kurang diperhatikan, baik dalam pengelolaan sampah maupun kebersihan lingkungan sekitar.

Dariuraian diatas, menunjukkan bahwa masalah sampah sudah

merupakan masalah prioritas yang harus ditangani dengan manajemen yang baik dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pada saat ini banyak kota-kota besar yang kewalahan dalam pengelolaan dan penanganan sampah, hal ini bisa disebabkan semakin bertambahnya volume sampah yang harus dikelola daerah, sedangkan kondisi tempat atau lokasi pembuangan akhir sampah sudah over capacity, serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan masih kurang memadai, dan banyak kendala-kendala lain baik dari masyarakat maupun para pelayan publik yang mengelola kebersihan lingkungan.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan dalam latar belakang masalah ini, maka penulis menyimpulkan dan tertarik untuk menyusun penelitian mengenai “Analisis Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.”

## **2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat terhadap peraturan pemerintah masih kurang, sehingga masih banyak masyarakat yang melanggar dan membuang sampah tidak sesuai tempatnya.
2. Pemerintah tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap warga yang melanggar peraturan tersebut.
3. Banyaknya penimbunan barang bekas sehingga terjadi penumpukan sampah di sekitar TPS.

## **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang berangkat dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka fokus penelitian ini diarahkan pada Proses Analisis Kebijakan Ketertiban Umum mengenai Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara tepatnya pada masyarakat di lingkungan pasar rakyat Parit Haji Husein II.

## **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari fokus penelitian diatas maka rumusan masalah yang terjadi di kelurahan Bangka Belitung Darat mengarah pada pengelolaan yaitu: “Bagaimana Analisis Kebijakan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan

Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara?”

## 5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian, untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara.

## 6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 6.1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan nantinya dapat dijadikan bahan masukan dalam ilmu kebijakan sehingga dapat dijadikan bahan studi perbandingan dalam pengembangan kedisiplinan, serta kajian kebijakan publik yang berkenaan dengan pengaruh kebijakan publik yang mengarahkan kepada pengembangan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa Prodi Administrasi Publik dengan fokus kajian kebijakan dan khususnya dalam pembahasan topik mengenai kebijakan penanganan sampah.

### 6.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota dalam pengelolaan sampah dan sebagai sumbangan pemikiran dan informasi kepada pihak yang mempunyai hubungan dengan masalah ini, khususnya bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak untuk memberikan sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk menjaga lingkungan sekitarnya.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan Publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor Pemerintah (Dunn, 2000:132). Adapun pengertian kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli antara lain:

Chandler dan Plano (dalam Keban, 1994:40) mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah penggunaan strategis dari sumber-sumber yang ada untuk menghilangkan masalah-masalah negara atau pemerintah.

Menurut R. Dye (1981:1), mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Juga pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan, dan kebijakan publik ini harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan hanya mencerminkan perwujudan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Sedangkan menurut Friedrich (Nugroho 2004:4) mendefinisikannya sebagai “suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”.

Dari berbagai pengertian kebijakan publik diatas, Islamy (1994:21) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau

berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Kebijakan dapat pula diartikan sebagai bentuk ketetapan yang mengatur yang dikeluarkan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan, jika ketetapan tersebut memiliki sasaran kehidupan orang banyak atau masyarakat luas maka kebijakan itu dikategorikan sebagai kebijakan publik. Dalam perkembangan Ilmu Administrasi Negara baik di negara berkembang bahkan di negara maju sekalipun, kebijakan publik merupakan masalah politik yang menarik untuk dikaji dan dibahas.

## **2. Analisis Kebijakan**

Analisis kebijakan ialah proses atau kegiatan mensintesa informasi, termasuk hasil-hasil penelitian, untuk menghasilkan rekomendasi opsi desain kebijakan publik. Kebijakan publik ialah keputusan atau tindakan pemerintah yang berpengaruh atau mengarah pada tindakan individu dalam kelompok masyarakat. ”Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan

eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dalam teori analisis kebijakan mempunyai proses atau tahapan, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori proses analisis kebijakan menurut Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) antara lain sebagai berikut:

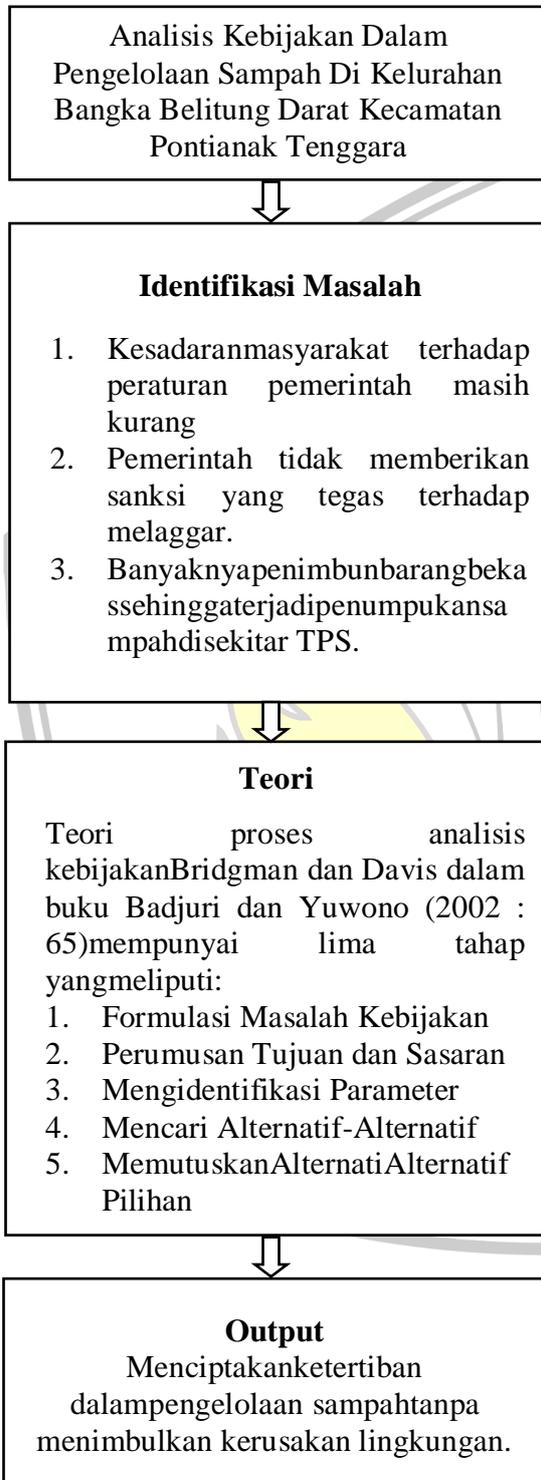
1. Formulasi Masalah Kebijakan
2. Perumusan Tujuan dan Sasaran
3. Mengidentifikasi Parameter
4. Mencari Alternatif-Alternatif
5. Memutuskan Alternatif-Alternatif Pilihan.

Dalam analisis kebijakan terdapat kriteria atau parameter kebijakan. Menurut Bardach (dalam AG. Subarsono 2005:58-60) mengajukan empat kriteria dalam menilai alternatif kebijakan, yaitu:

1. Kelayakan Teknis (*Technical Feasibility*)
2. Kemungkinan Ekonomi dan Finansial (*Economic and Financial Possibility*)
3. Kelayakan Politik (*Political Viability*)
4. Kelayakan Administratif

Dari uraian diatas maka analisis kebijakan yang diambil dalam pengelolaan sampah di Kota Pontianak Kecamatan Pontianak Tenggara Tepatnya di Kelurahan Bangka Belitung Darat jln. Parit Haji Huesin II maka peneliti menggunakan teori Analisis Kebijakan menurut Menurut Bridgman dan Davis (dalam Badjuri dan Yuwono 2002:65) sebagaimana yang telah disebutkan diatas, dalam Proses analisis kebijakan mempunyai lima tahap yang saling bergantung yang secara bersama-sama membentuk siklus aktifitas intelektual yang kompleks. Dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran. Teori Bridgman dan Davis sesuai dengan kebijaksanaan pengelolaan permasalahan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang mana masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tersebut.

### 3. Kerangka Pikir Penelitian



Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pada pendekatan ini, menurut Creswell (1998:15) peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya Sugiono (2003:11).

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari buku-buku atau literatur-literatur untuk mendapatkan bahan tertulis guna

memperoleh dasar berupa teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara secara langsung kelokasi penelitian, guna memperoleh data dan informasi yang akurat mengenai masalah yang akan diteliti.

Lokasi Penelitian diambil yaitu Dikelurahan Bangka Belitung Darat Kecamatan Pontianak Tenggara. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan berbagai hal dalam permasalahan yang berkaitan pada pengelolaan sampah.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini, yaitu

- 1) Sekretaris Kantor Kelurahan Bangka Belitung Darat.
- 2) Staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
- 3) Masyarakat kelurahan Bangka Belitung Darat.

Sedangkan objek penelitian yaitu mencakup keseluruhan individu, kelompok, elemen atau unsur, peristiwa yang dijadikan dasar penelitian.

## **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Formulasi Masalah Kebijakan**

Formulasi masalah kebijakan merupakan pekerjaan yang sangat prinsipil dan krusial karena jika dalam memfokuskan masalahnya tersebut salah atau tidak benar, maka kebijakan publik yang akan diterapkan juga tidak benar. Pelaksanaan program kebijakan pemerintah yang terjadi dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat adalah jumlah bak sampah yang sedikit sedangkan sampah yang dari waktu ke waktu semakin bertambah serta pengelolaan jumlah sampah tidak seimbang dari jumlah keseluruhan sampah yang ada.

Pelaksanaan penelitian yang terjadi mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih terdapat masalah. Adapun faktor penyebab terjadinya masalah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat disebabkan oleh: kurangnya armada sarana dan prasarana, terbatasnya dana anggaran, dan tingkat kesadaran

masyarakat akan peduli sampah masih rendah.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa untuk formulasi masalah kebijakan yang mengarah pada pelaksanaan program kebijakan pemerintah mengenai penetapan waktu pembuangan sampah sudah ditetapkan namun belum diterapkan dengan baik oleh masyarakat. Yang mana terdapat peraturan pemerintah daerah kota Pontianak nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum, terdapat Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi Setiap orang/badan wajib membuang sampah di TPS resmi pada waktu yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Pontianak.

## **2. Perumusan Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sasarannya adalah dapat meningkatkan kesadaran bersama terutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukkan bahwa mengenai tujuan dan sasaran dalam kebijakan sangat baik dan berfokus pada kemajuan untuk mendatang yaitu sesuai visi dan misinya untuk menciptakan wilayah yang lebih baik dan maju.

Pada pembahasan ini, tujuan dari kebijakan pemerintah daerah sudah tertera pada Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum. Berikut adalah tujuan peraturan daerah nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban umum yaitu terdapat pada Pasal 2 ayat (2) berbunyi tentang Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban dan ketentraman di lingkungan masing-masing.

## **3. Mengidentifikasi Parameter**

Kebijakan Mengidentifikasi parameter kebijakan adalah kegiatan melakukan pengukuran terhadap permasalahan yang akan terjadi. Dalam melakukan pengukuran terhadap alternatif kebijakan yang terdiri atas beberapa kriteria yaitu: Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak

namun fasilitasnya berkurang, Kemungkinan Ekonomi dan Finansial dapat dilihat dari hasil penelitian ini bisa dikatakan kekurangan anggaran yang mempengaruhi kurangnya armada dalam proses pengelolaan, dan Kelayakan Administratif, dalam penelitian ini administratifnya baik dan mendukung.

Kebijakan Identifikasi parameter merupakan hal penting dalam rangka melakukan tes atau pengujian terhadap hal-hal yang mungkin dilakukan berkaitan dengan sebuah penelitian. Parameter-parameter kebijakan ini perlu di dalam lebih lanjut khususnya berkaitan dengan indikator-indikator pertanyaan. Dalam pengidentifikasian penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah cukup baik. Dan pelaksana sudah bisa memanfaatkan fasilitas yang sudah disediakan dan dapat menggunakannya sebaik mungkin sesuai aturan yang telah diberikan oleh pemerintah.

#### **4. Mencari Alternatif-Alternatif**

Ada beberapa alternatif kebijakan dalam menangani permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat yaitu:

- 1) Alternatif kebijakan penambahan dan peningkatan kualitas armada dan sarana pengelolaan sampah bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar para petugas dalam bekerja sehingga sampah yang dikelola akan semakin bertambah banyak.
- 2) Alternatif kebijakan menambah jumlah anggaran alokasi bertujuan untuk mengatasi kurang dan rusaknya armada sarana dan prasarana pelayanan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan dengan anggaran dana yang besar, maka armada sarana dan prasarana yang masih kurang dapat ditambah dan armada yang rusak dapat diperbaiki atau diganti dengan yang baru apabila kondisi kerusakan sudah terlalu parah.
- 3) Alternatif kebijakan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah dibuat bertujuan agar seluruh masyarakat sadar akan bahaya sampah jika dibuang sembarangan tempat. Diharapkan tentunya dengan adanya sanksi membuat

masyarakat semakin peduli dengan lingkungan.

### 5. Memutuskan Alternatif Kebijakan

Alternatif kebijakan menambah anggaran alokasi pengelolaan sampah merupakan alternatif kebijakan terbaik. Hal ini karena melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif karena disebabkan oleh armada sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memadai. Adanya penambahan anggaran alokasi pengelolaan sampah, maka dapat mempermudah dalam menambah dan meningkatkan kualitas dari armada sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan personil petugas kebersihan.

Memutuskan alternatif-alternatif pilihan merupakan proses akhir yang harus dilakukan setelah tahapan mencari alternatif dilakukan. Hal ini berarti bahwa produk dari analisis kebijakan adalah rekomendasi kebijakan yang tentunya akan lebih baik jika lebih dari satu pilihan, agar pihak pengambilan keputusan dapat mempertimbangkan pilihan mana yang akan diputuskan. Analisis secara lengkap dari masing-

masing alternatif-alternatif tentunya sangat diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang diungkapkan menunjukkan bahwa penentuan alternatif yang sangat berpengaruh pada keberhasilan suatu kebijakan tersebut, karena sangat mengacu pada pemilihan terbaik untuk membuat keputusan baru. Dan alternatif yang disarankan disini cukup bagus, dan mengarah pada kepentingan bersama.

Dalam pemilihan alternatif sudah dilakukan dengan baik mengenai penambahan anggaran alokasi dan adanya pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggar kebijakan yang mana dapat dilihat dari ketentuan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan yaitu peraturan pemerintah daerah nomor 11 tahun 2019 tentang ketertiban umum mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggar yang berbunyi pada Pasal 44 ayat(1) Pembebanan biaya paksaan penegakan hukum dikenakan terhadap:

1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp. 500.000,- (Lima

Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.

2. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus ribu rupiah) dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.

Responden yang membuang sampah berdasarkan data yang digunakan jasa pengangkutan oleh petugas atau 70% masyarakat menjawab jadwal pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan dilaksanakan setiap hari, dan 30% menjawab tidak pernah karena mereka tidak menggunakan jasa pengangkutan sampah oleh petugas kebersihan melainkan dari petugas dinas daerah.

## E. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih belum efektif karena dalam teori proses analisis kebijakan masih tidak sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat saat ini, berikut adalah kesimpulan dari penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya berdasarkan tahapan proses analisis kebijakan, yaitu:

#### 1. Formulasi Masalah Kebijakan

Pelaksanaan penelitian yang terjadi mengenai pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat masih terdapat masalah. Adapun faktor penyebab terjadinya masalah dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat disebabkan oleh: kurangnya armada sarana dan prasarana, terbatasnya dana anggaran, dan tingkat kesadaran masyarakat akan peduli sampah masih rendah

#### 2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat adalah menciptakan lingkungan hidup yang sehat dan baik guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan sasarannya adalah dapat meningkatkan kesadaran bersama terutama masyarakat terhadap kebersihan lingkungan hidup.

### 3. Mengidentifikasi Parameter

Kebijakan Mengidentifikasi parameter kebijakan adalah kegiatan melakukan pengukuran terhadap permasalahan yang akan terjadi. Dalam melakukan pengukuran terhadap alternatif kebijakan yang terdiri atas beberapa kriteria yaitu: Kelayakan Teknis masih dikategorikan layak namun fasilitasnya berkurang, Kemungkinan Ekonomi dan Finansial dapat dilihat dari hasil penelitian ini bisa dikatakan kekurangan anggaran yang mempengaruhi kurangnya armada dalam proses pengelolaan, dan Kelayakan Administratif, dalam

penelitian ini administratifnya baik dan mendukung.

### 4. Mencari Alternatif-Alternatif

Ada beberapa alternatif kebijakan dalam menangani permasalahan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kelurahan Bangka Belitung Darat yaitu:

1) Alternatif kebijakan penambahan dan peningkatan kualitas armada dan sarana pengelolaan sampah bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar para petugas dalam bekerja sehingga sampah yang dikelola akan semakin bertambah banyak.

2) Alternatif kebijakan menambah jumlah anggaran alokasi bertujuan untuk mengatasi kurang dan rusaknya armada sarana dan prasarana pelayanan pengelolaan sampah. Hal ini dikarenakan dengan anggaran dana yang besar, maka armada sarana dan prasarana yang masih kurang dapat ditambah dan armada yang rusak dapat diperbaiki atau diganti dengan

yang baru apabila kondisi kerusakan sudah terlalu parah.

- 3) Alternatif kebijakan pemberian sanksi kepada masyarakat yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah dibuat bertujuan agar seluruh masyarakat sadar akan bahaya sampah jika dibuang sembarangan tempat. Diharapkan tentunya dengan adanya sanksi membuat masyarakat semakin peduli dengan lingkungan.

5. Memutuskan Alternatif Kebijakan  
Alternatif kebijakan menambah anggaran alokasi pengelolaan sampah merupakan alternatif kebijakan terbaik. Hal ini karena melihat kondisi dari pelaksanaan pengelolaan sampah yang belum efektif karena disebabkan oleh armada sarana dan prasarana yang masih kurang dan belum memadai. Adanya penambahan anggaran alokasi pengelolaan sampah, maka dapat mempermudah dalam menambah dan meningkatkan kualitas dari armada sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan personil petugas kebersihan.

## 2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis memberikan berbagai saran sebagai masukan dalam penelitian, antara lain:

### 1. Formulasi Masalah Kebijakan

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan kebijakan, pemerintah hendaknya memberikan sosialisasi agar masyarakat mengetahui apa saja bentuk kebijakan yang harus dipatuhi, sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.

### 2. Perumusan Tujuan dan Sasaran

Pemerintah harusnya memberikan larangan/sanksi yang tegas terhadap warga yang melanggar peraturan tersebut. Dan memberikan teguran kepada penimbun barang bekas untuk tidak menumpuk barang bekasnya di sekitaran TPS karena dapat menimbulkan bau yang busuk dan lingkungan yang tidak sehat.

### 3. Mengidentifikasi Parameter

Pemerintah hendaknya memberikan kebijakan penambahan anggaran alokasi pengelolaan sampah.

walaupun sudah diajukan, diharapkan pihak pemerintah dapat memberikansesuai dengan kapasitas kebutuhan di wilayah tersebut, misalnya untuk menambah sarana dan prasarana kebersihan agar terlaksana dengan baik.

4. Mencari Alternatif-Alternatif  
Perlunya penambahan lokasi TPS di Kelurahan Bangka Belitung Darat, karena jumlah sampah perharinya selalu bertambah sesuai dengan penambahan penduduk di setiap tahunnya.
5. Memutuskan Alternatif Kebijakan  
Diharapkan kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada para pengumpul barang bekas untuk tidak menumpuk barangnya di sekitaran tempat pembuangan sampah sementara, agar lingkungan tidak terlihat kumuh, tidak berbau, bersih dan sehat.

## F. REFERENSI

### Buku-Buku:

Abdulah Wahab, solicshin (1997).  
*Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Edisi

Kedua, Cetakan Pertama.  
Penerbit Bumi Aksara Jakarta.

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah.

Badjuri dan Yuwono. 2002. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Undip Press.

Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Diterjemahkan oleh: Samodra dkk. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

George Edwar III, (1980:1). *Teori Implementasi kebijakan dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan*

Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Charles O, 1991, *Pengantar Kebijakan Publik* (Ahli Bahasa; Riky Istamto), Jakarta: CV .Rajawali.

Moleong, LExy. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Public*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008  
Tentang Pengelolaan Sampah.  
Pontianak.

Subarsono A G. 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suprihatin. Agung dkk ( 1999 ) *Sampah Dan Pengelolanya*. Edisi Kedua. Penerbit PPGT/VEDC Malang bekerjasama dengan Swisscontact. Malang

Sugiono (2000) *Metode Penelitian Administrasi*. Cetakan Kedelapan. CV. Alfabeta. Bandung.

Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI.

**Dokumen:**

Kelurahan Bangka Belitung Darat. 2020. Profil kelurahan Bangka Belitung Darat. Pontianak.

Dinas Lingkungan Hidup. 2020. Profil Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak. Pontianak.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum. Pontianak.